

PERAN BANK MILIK NEGARA DALAM MENDUKUNG PEMBIAYAAN BERKELANJUTAN

19

Hilma Meilani

Abstrak

Pembiayaan berkelanjutan semakin diperlukan seiring dengan tuntutan keberlanjutan lingkungan di berbagai sektor. Isu mengenai keuangan berkelanjutan merupakan salah satu topik dari 6 isu prioritas di bidang keuangan pada Presidensi G20 Indonesia. Berbagai langkah perlu diupayakan oleh seluruh pihak, termasuk BUMN perbankan untuk berperan dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan. Tulisan ini mengkaji peran BUMN perbankan dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan dan strategi pemerintah dalam mengembangkan instrumen keuangan berkelanjutan. Tiga bank BUMN yaitu BRI, BNI, dan Bank Mandiri telah berkomitmen untuk ikut berperan dalam menjaga iklim melalui penyaluran pembiayaan kepada Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB). Strategi pemerintah antara lain adalah dengan mengembangkan instrumen keuangan dan investasi hijau, serta membangun ekosistem instrumen keuangan berkelanjutan. Komisi VI DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap implementasi dan evaluasi kebijakan pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan di BUMN perbankan, dan Komisi XI DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap kebijakan penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.

Pendahuluan

Isu mengenai keuangan berkelanjutan merupakan salah satu topik dari 6 isu prioritas di bidang keuangan yang diangkat pada Presidensi G20 Indonesia. Isu keuangan berkelanjutan ini terkait upaya dalam mengembangkan sumber-sumber pembiayaan yang dapat mendukung upaya dunia dalam mengatasi perubahan iklim (*sustainable finance*), termasuk menangani risiko transisi menuju

ekonomi rendah karbon (bi.go.id/, 31 Mei 2022).

Upaya pemerintah untuk meningkatkan pembiayaan berkelanjutan telah membuat kontribusi kredit sektor pertambangan dan penggalian stagnan di bawah 3% terhadap total kredit perbankan. Nilai kredit bank ke pertambangan pada Januari-April 2022 terus berada di urutan terendah dibandingkan sektor-sektor lain. Berdasarkan data Bank Indonesia



(BI), kredit investasi yang disalurkan ke sektor pertambangan dan penggalian per April 2022 sebesar Rp83 triliun. Penyaluran kredit modal kerja ke sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp90,8 triliun. Nilai kredit investasi di sektor pertambangan dan penggalian berada pada urutan dua terbawah setelah sektor jasa-jasa yang mencapai Rp79,9 triliun. Kredit modal kerja yang disalurkan perbankan ke sektor pertambangan juga berada di urutan kedua dari bawah setelah sektor listrik, gas, dan air bersih yang sebesar Rp23,5 triliun. Kecilnya angka penyaluran kredit ke sektor pertambangan dan penggalian tidak terlepas dari komitmen sejumlah bank di Indonesia yang mulai menghindari kredit di sektor tersebut karena sifat usahanya yang merusak ekosistem secara sistemis dan berisiko besar. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi salah satu bank yang menghentikan penyaluran kredit ke sektor usaha minyak bumi dan batu bara. BRI akan fokus menyalurkan kredit ke sektor UMKM atau pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan semangat *environmental, social, and governance* (ESG) (Bisnis Indonesia, 28 Mei 2022).

Sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), berbagai langkah dan strategi perlu diupayakan seluruh pihak, termasuk bank milik negara (BUMN perbankan) untuk berperan mendukung pembiayaan berkelanjutan. Pemanfaatan pinjaman berkelanjutan dinilai masih sulit dimanfaatkan oleh sektor publik dan swasta dalam mendorong ekonomi hijau dan berkelanjutan. Tulisan ini mengkaji peran BUMN perbankan

dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan melalui penyaluran pembiayaan Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB), dan strategi pemerintah dalam mengembangkan instrumen keuangan berkelanjutan.

Pembiayaan Berkelanjutan

Untuk menyatukan langkah bank-bank umum di Indonesia dalam pembiayaan berkelanjutan maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten dan Perusahaan Publik. Terdapat 3 (tiga) prioritas implementasi keuangan berkelanjutan, salah satunya terkait dengan peningkatan portofolio pembiayaan keuangan berkelanjutan. Bank-bank dapat menentukan kriteria kegiatan usaha berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: *pertama*, efisiensi dan efektivitas, yaitu mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. *Kedua*, mitigasi, yaitu mencegah/membatasi/mengurangi/memperbaiki kerusakan lingkungan hidup, peningkatan polusi, limbah, kerusakan ekosistem, dan ketidakadilan/kesenjangan sosial. *Ketiga*, adaptasi, yaitu dengan memberikan solusi bagi masyarakat yang menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk pembaruan teknologi hemat energi dan rendah emisi, konservasi sumber daya dan daur ulang, perbaikan kesejahteraan masyarakat yang terdampak.

Berdasarkan pedoman teknis bagi bank terkait POJK No.51/POJK.03/2017, kategori kegiatan usaha berkelanjutan yaitu: 1) energi terbarukan; 2) efisiensi energi; 3) pencegahan dan pengendalian polusi; 4) pengelolaan sumber daya

alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan; 5) konservasi keanekaragaman hayati darat dan air; 6) transportasi ramah lingkungan; 7) pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan; 8) adaptasi perubahan iklim; 9) pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan; 10) bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional; 11) kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain dari kegiatan usaha berwawasan lingkungan lainnya; 12) kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain dari kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Bank-bank dapat memilih dari dua belas kategori usaha tersebut sebagai prioritas pembiayaan keuangan berkelanjutan sesuai rencana bisnis

serta kapasitas yang dimiliki (OJK, 2018).

Peran BUMN Perbankan dalam Pembiayaan Berkelanjutan

Sektor BUMN perbankan yang melaksanakan pembiayaan berkelanjutan antara lain adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri). Ketiga bank BUMN tersebut telah berkomitmen untuk ikut berperan dalam menjaga iklim melalui pembiayaan yang disalurkan pada sektor kegiatan usaha berkelanjutan. Pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan oleh tiga bank BUMN tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan oleh Bank BUMN (Dalam Triliun Rupiah)

No.	Sektor	BRI		Bank Mandiri		BNI	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
1.	Energi Terbarukan	4,7	5,6	2,88	4,28	4,9	9,5
2.	Efisiensi Energi	-	-	-	-	0,16	17,7
3.	Pencegahan & Pengendalian Polusi	0,02	0,03	0,04	-	0,2	5,1
4.	Pengelolaan SDA Hayati & Penggunaan Lahan Berkelanjutan	37,2	43,2	69,0	88,5	21,2	14,0
5.	Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat & Air	0,7	0,67	-	-	-	0,03
6.	Transportasi Ramah Lingkungan	15,5	14,9	-	2,0	-	-
7.	Pengelolaan Air & Air Limbah Berkelanjutan	0,6	0,01	1,98	1,20	0,02	2,8
8.	Adaptasi Perubahan Iklim	-	-	-	-	-	-
9.	<i>Eco-efficient Product</i>	3,8	4,1	-	-	1,16	0,25
10.	Bangunan Berwawasan Lingkungan	2,8	2,3	0,3	0,2	0,53	5,28
11.	Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan Lainnya	0,5	0,09	3,0	5,6	1,2	0,58
12.	UMKM	484,4	543,4	90,0	103,5	117,0	113,8
	JUMLAH	550,3	614,2	167,3	205,4	143,3	172,4

Sumber: Laporan Keberlanjutan 2020 dan 2021 Bank Mandiri, Laporan Keberlanjutan 2021 BRI, BNI

Berdasarkan Tabel 1, pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan oleh BRI pada tahun 2021 sebesar Rp614,2 triliun atau naik 12% dari tahun 2020. Tahun 2021 BRI menyalurkan kredit sebesar Rp943,7 triliun atau tumbuh 7,2% *year on year* (yoy). Dari total penyaluran kredit tersebut, 65,1% merupakan kredit yang disalurkan kepada KKUB, yang terdiri dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp543,4 triliun dan Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) sebesar Rp70,8 triliun. Portofolio hijau BRI hingga kuartal I-2022, sekitar 65,6% atau Rp639,9 triliun dari total portofolio penyaluran kredit, meningkat 13,4% (yoy) dari tahun lalu sebesar Rp564 triliun. Total penyaluran kredit BRI tersebut sebagian besar untuk UMKM Rp568,4 triliun, sektor pengelolaan lingkungan berkelanjutan terkait sumber daya alam hayati dan tata guna lahan Rp45,2 triliun, dan transportasi rendah emisi Rp14,6 triliun (bumn.go.id, 7 Juni 2022).

Pembiayaan KKUB oleh Bank Mandiri pada tahun 2021 sebesar Rp205,4 triliun, atau meningkat 23% dibandingkan dengan tahun 2020. Portofolio hijau Bank Mandiri hingga Maret 2022 mencapai Rp210 triliun, atau tumbuh 22,8% (yoy) dari posisi yang sama pada tahun lalu sebesar Rp171 triliun, sebagian besar yaitu Rp107 triliun untuk penyaluran kredit ke sektor UMKM, sektor EBT Rp4,4 triliun, sektor kelapa sawit berkelanjutan Rp89,1 triliun, sektor air berkelanjutan dan pengelolaan limbah air Rp1,2 triliun, sektor *clean transportation* Rp2,1 triliun, dan ke subsektor lainnya senilai Rp5,6 triliun (kontan.co.id, 01 Juni 2022).

Pembiayaan KKUB oleh BNI pada tahun 2021 sebesar Rp172,4 triliun, naik 20% dari tahun 2020 yang sebesar Rp140.718 miliar. Portofolio hijau BNI

per Maret 2022 mencapai Rp170,5 triliun, tumbuh 21,8% (yoy). Nilai portofolio hijau tersebut setara dengan 28,9% dari total portofolio kredit perseroan. Pembiayaan untuk UMKM dan pemberdayaan sosial ekonomi memiliki porsi terbesar, yaitu Rp115,2 triliun, pengelolaan sumber daya alam hayati dan tata guna lahan yang berkelanjutan Rp14,9 triliun, sektor EBT Rp10,3 triliun, pencegahan polusi Rp6,8 triliun, dan pembiayaan hijau lainnya Rp23,3 triliun (bisnis.com, 1 Juni 2022). BUMN perbankan pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan kenaikan penyaluran pembiayaan pada kegiatan usaha berkelanjutan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan perhatian dunia pada isu lingkungan semakin menuntut perbankan untuk segera melakukan transformasi dalam kegiatannya melalui pembiayaan usaha berkelanjutan yang pada dasarnya mendorong agar setiap kegiatan ekonomi harus dapat menekan dampak negatif terhadap iklim dan lingkungan.

Strategi untuk Mengembangkan Keuangan Berkelanjutan

Strategi yang didorong Indonesia sebagai Presidensi G20 untuk mengembangkan instrumen keuangan berkelanjutan adalah: *pertama*, mengembangkan instrumen keuangan dan investasi hijau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. *Kedua*, membangun ekosistem instrumen keuangan berkelanjutan dengan dukungan semua pihak terkait melalui kebijakan insentif maupun disinsentif, membangun infrastruktur yang resilien, termasuk elemen penting seperti taksonomi hijau, jasa verifikasi, lembaga sertifikasi hijau, penyedia *rating* hijau. *Ketiga*, program pembangunan kapasitas dan bantuan teknis berkelanjutan (bi.go.id, diakses 01 Juni 2022).

Untuk mendorong pembiayaan berkelanjutan, pemerintah mengeluarkan

Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I (2015–2109) dan Tahap II (2021–2025). Tahun 2022 OJK telah menyusun Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0. sebagai klasifikasi sektor berdasarkan kegiatan usaha yang mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim. Delapan bank (Bank Mandiri, BNI, BRI, BRI Syariah, BCA, Bank Muamalat, BJB, dan Bank Artha Graha) yang tergabung sebagai *first movers* telah membentuk Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI) pada tahun 2018 sebagai komitmen dari industri perbankan dalam mendukung pembiayaan hijau. Sampai dengan tahun lalu 15 bank telah bergabung dalam IKBI (Bisnis Indonesia, 7 Juni 2022).

Tiga bank BUMN yaitu BRI, BNI, dan Bank Mandiri telah berkomitmen untuk menyalurkan pembiayaan pada sektor kegiatan usaha berkelanjutan. Pada tahun 2021 pembiayaan bank BUMN tersebut kepada KKUB mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, namun porsi pembiayaan untuk sektor EBT masih relatif kecil. Selain itu, BUMN perbankan masih memiliki portfolio kredit di sektor energi fosil. Sebagai contoh, BNI masih memiliki portofolio kredit kepada sektor batu bara sebesar 2% terhadap total kredit (Bisnis Indonesia, 7 Juni 2022). Mengingat energi fosil masih dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dan tidak ada aturan pemerintah yang melarang perbankan membiayai sektor energi fosil, maka diperlukan komitmen perbankan untuk mendukung pembiayaan berkelanjutan dengan meningkatkan pembiayaan sektor EBT dan secara bertahap mengurangi pembiayaan sektor energi fosil. Hal tersebut sebagai upaya untuk mendorong transisi energi nasional dalam mewujudkan *Net Zero Emission* tahun 2060.

Penutup

Peningkatan perhatian dunia pada isu lingkungan semakin menuntut perbankan untuk segera melakukan transformasi dalam kegiatan usahanya. BUMN perbankan antara lain BRI, Bank Mandiri, BNI telah berkomitmen untuk ikut berperan dalam menjaga iklim melalui pembiayaan yang disalurkan pada sektor kegiatan usaha berkelanjutan. Komitmen perbankan diperlukan untuk meningkatkan pembiayaan di sektor EBT dan secara bertahap mengurangi pembiayaan sektor energi fosil untuk mendorong transisi energi nasional. Selain itu juga diperlukan kolaborasi dan koordinasi lembaga keuangan dengan pemerintah serta BI dan OJK untuk lebih aktif mempromosikan pembiayaan dan instrumen keuangan berkelanjutan.

Komisi VI DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap implementasi dan evaluasi kebijakan pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan di BUMN perbankan, dan Komisi XI DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap kebijakan penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik, serta mendorong pemerintah untuk mengembangkan ekosistem keuangan berkelanjutan.

Referensi

- “Bersama Mendorong Instrumen Keuangan Berkelanjutan”, 18 Februari 2022, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_245922.aspx, diakses 1 Juni 2022.
- “BI Kembangkan Instrumen Pasar Keuangan Hijau untuk Dorong Pembiayaan Ekonomi, 25 Oktober 2021, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news->

release/Pages/sp_2327321.aspx, diakses 31 Mei 2022.

“Kredit Tambang Terhimpit”, *Bisnis Indonesia*, 28 Mei 2022, hal.1.

Laporan Keberlanjutan 2020, 2021 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Laporan Keberlanjutan 2021 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Laporan Keberlanjutan 2021 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Otoritas Jasa Keuangan. 2018. Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten dan Perusahaan Publik.

“Penyaluran Kredit Bank Mandiri ke Sektor ESG Tembus Rp210 Triliun hingga Maret”, 11 Mei 2022, <https://keuangan.kontan.co.id/news/penyaluran-kredit-bank-mandiri-ke-sektor-esg-tembus-rp-210-triliun-hingga-maret>, diakses 1 Juni 2022.

“Peran Bank Kerek Pembiayaan Ramah Lingkungan”, *Bisnis Indonesia*, 7 Juni 2022, hal. 15.

“Wah! Portofolio Pembiayaan Hijau BNI BBNI Capai Rp170,5 Triliun”, 13 Mei 2022, <https://m.bisnis.com/amp/read/20220513/90/1532982/wah-portofolio-pembiayaan-hijau-bni-bbni-capai-rp1705-triliun>, diakses 1 Juni 2022.

“65% Portofolio Kredit BRI Implementasikan Prinsip ESG,” 6 Juni 2022, <https://bumn.go.id/post/65-portofolio-kredit-bri-implementasikan-prinsip-esg>, diakses 7 Juni 2022.



Hilma Meilani
hilma.meilani@dpr.go.id

Hilma Meilani, S.T., MBA., menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, dan pendidikan S2 jurusan Finance pada Program Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda dengan kepakaran Kebijakan Ekonomi pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain: “Rasio Efektivitas dan Kontribusi Pendapatan Daerah Terhadap Belanja dan Investasi Daerah” (2016); “Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Sebelum dan Sesudah Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009” (2017); “Peran Bank Indonesia dalam Meningkatkan Pembiayaan bagi UMKM” (2018); “Fasilitasi Pemerintah dalam Pengembangan UMKM Digital dan Technopreneur” (2019); Potensi, Perkembangan dan Strategi Wisata Halal Daerah” (2020); “Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah di Indonesia Tahun 2010-2019” (2021).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.